

## Pelatihan Pengelolaan Keuangan, Penyusunan Model Bisnis, SOP, dan Manajemen BUMDes KDMP Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi

Liona Efrina<sup>1</sup>, Adria Wuri Lastari<sup>2</sup>, Eka Julianti Efris Saputri<sup>3</sup>, Vera Amalia<sup>4</sup>, Parassela Pangestu Primadiva<sup>5</sup>, Aditya Pradana<sup>6</sup>, Rian Fitra Apriyandi<sup>7</sup>, Haviz Taufik<sup>8</sup>, Azwani Aulia<sup>9</sup>, M. Arjun<sup>10</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

Received : 26 November 2025, Revised : 30 November 2025, Published : 8 Desember 2025

### Corresponding Author

Nama Penulis: Liona Efrina

E-mail: [lionaefrinaunaja2021@gmail.com](mailto:lionaefrinaunaja2021@gmail.com)

### Abstrak

Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan desa merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel serta mendukung kemandirian ekonomi. Program pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam aspek perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan ini mengadopsi pendekatan workshop berbasis modul, praktik simulatif, serta penerapan aplikasi digital BUMDes sebagai alat bantu dalam sistem pelaporan keuangan. Peserta pelatihan menunjukkan peningkatan kemampuan dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan yang berstandar, serta perumusan model bisnis dan SOP yang terstruktur. Digitalisasi administrasi dan manajemen keuangan terbukti mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data. Secara simultan, Desa Bukit Makmur mengalami transformasi menuju konsep Smart Agro-Ecopreneurship. Intervensi strategis ini mencakup digitalisasi sistem keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi produk dan pemasaran digital. Hasil konkret dari program ini mencakup penerapan standar akuntansi SAK-ETAP dalam tata kelola keuangan, terbentuknya lima unit usaha produktif yang terintegrasi, serta munculnya inovasi ekonomi sirkular melalui produk-produk lokal seperti, keripik olahan gedebog pisang, keripik pare, manisan pepaya, abon pepaya, dan bioenergi. Model pemasaran digital juga mulai diterapkan melalui platform daring, yang memperluas jangkauan pasar. Dampak positif dari kegiatan ini mencakup peningkatan pendapatan BUMDes dan masyarakat, akuntabilitas kelembagaan, serta kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Model ini terbukti menjadi kerangka pemberdayaan ekonomi desa yang adaptif dan dapat direplikasi, serta menjadi acuan strategis dalam transformasi desa mandiri dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi

**Kata kunci** - BUMDes KDMP, pengelolaan keuangan desa, digitalisasi, ekonomi sirkular, pemberdayaan masyarakat

### Abstract

Strengthening the capacity of village financial management is a key element in realizing accountable village governance and supporting economic independence. The training and mentoring program carried out in Bukit Makmur Village, Sungai Bahar District, Muaro Jambi Regency, is designed to improve the competence of village officials and managers of Village-Owned Enterprises (BUMDes) and Red and White Village Cooperatives (KDMP) in terms of planning, reporting, and financial accountability. This activity adopts a module-based workshop approach, simulative practices, and the application of BUMDes digital applications as a tool in the financial reporting system. The trainees showed improved skills in recording transactions, preparing standardized financial statements, and formulating structured

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

business models and SOPs. Digitization of financial administration and management has been proven to speed up the reporting process and improve data accuracy. Simultaneously, Bukit Makmur Village is undergoing a transformation towards the concept of Smart Agro-Ecopreneurship. These strategic interventions include the digitalization of the financial system, increasing the capacity of human resources, and the development of product innovation and digital marketing. The concrete results of this program include the application of SAK-ETAP accounting standards in financial governance, the formation of five integrated productive business units, and the emergence of circular economy innovations through local products such as processed gedebog banana chips, bitter melon chips, candied papaya, shredded papaya, and bioenergy. The digital marketing model is also starting to be implemented through online platforms, which expand the market reach. The positive impacts of this activity include increasing the income of BUMDes and the community, institutional accountability, and higher environmental awareness. This model has proven to be a framework for adaptive and replicable village economic empowerment, as well as a strategic reference in the transformation of independent and sustainable villages in the Muaro Jambi Regency area.

**Keywords** - BUMDes KDMP, village financial management, digitalization, circular economy, community empowerment

**How To Cite** : Efrina, L., Lastari, A. W., Saputri, E. J. E., Amalia, V., Primadiva, P. P., Pradana, A., Apriyandi, R. F., Taufik, H., Aulia, A., & Arjun, M. (2025). Pelatihan Pengelolaan Keuangan, Penyusunan Model Bisnis, SOP, dan Manajemen BUMDes KDMP Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 2450 - 2463. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.813>

**Copyright** ©2025 Liona Efrina, Adria Wuri Lastari, Eka Julianti Efris Saputri, Vera Amalia, Parassela Pangestu Primadiva, Aditya Pradana, Rian Fitra Apriyandi, Haviz Taufik, Azwani Aulia, M Arjun

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa di Indonesia memegang peranan krusial dalam konteks pembangunan nasional. Desa bukan sekadar unit pemerintahan terkecil, melainkan juga pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang esensial bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa memiliki dampak positif bagi komunitas lokal sekaligus berkontribusi terhadap kesejahteraan nasional. Dalam era otonomi daerah, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lindawaty et al., 2023).

Salah satu kebijakan utama adalah alokasi Dana Desa setiap tahun, yang memiliki potensi besar dalam peningkatan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal. Dana Desa memungkinkan pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan jembatan, yang memperkuat aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa (Agustin et al., 2024). Namun, tantangan dalam pengelolaan dana ini masih cukup signifikan, terutama terkait dengan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan. Permasalahan umum seperti perencanaan yang kurang matang, pelaporan yang tidak transparan, dan pertanggungjawaban yang lemah sering kali muncul dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat (Djahmiq et al., 2022). Untuk mengatasi tantangan ini, peningkatan kapasitas aparatur desa serta pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat diperlukan. BUMDes memiliki peranan strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, banyak BUMDes yang belum beroperasi secara optimal akibat kurangnya pelatihan dalam pengelolaan keuangan, model bisnis berkelanjutan, dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas (Sutrisno et al., 2024).

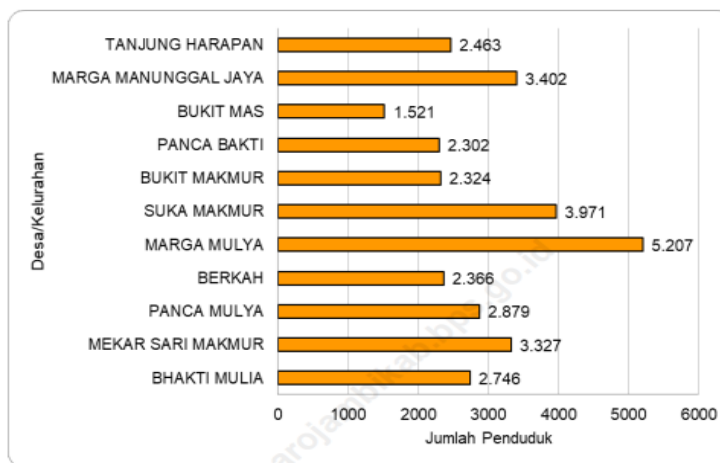
Studi kasus di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, menunjukkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa yang cukup besar, meskipun pengelolaan keuangan belum berjalan optimal. Kendala utama terletak pada kurangnya pelatihan bagi aparatur desa dan pengelola BUMDes dalam perencanaan anggaran partisipatif, penyusunan laporan keuangan yang transparan, serta manajemen keuangan yang profesional (Maulana et al., 2025). Permasalahan manajemen keuangan di Desa Bukit Makmur juga mencakup pencatatan manual yang tidak sistematis dan lemahnya SOP, yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hambatan ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan keterbatasan kompetensi teknis dan manajerial sebagai faktor utama ketidakteraturan dalam pembukuan dan pengawasan internal BUMDes (Putri et al., 2022). Namun, penguatan kapasitas dan pelatihan manajemen keuangan terbukti

efektif dalam meningkatkan kualitas pelaporan, disiplin pembukuan, dan kinerja usaha BUMDes di berbagai desa (Pratiwi et al., 2023). Hal ini membuka peluang untuk memperkuat fungsi BUMDes dan KDMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur dan pengelola BUMDes melalui pelatihan dan pendampingan terstruktur merupakan intervensi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Dengan demikian, Desa Bukit Makmur dan desa-desa lainnya dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif, meningkatkan PADes, dan mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.



Sumber/Source: BPS Kabupaten Muaro Jambi

**Gambar 1.** Peta wilayah Kecamatan Sungai Bahar, 2024



Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi/Population and Civil Registry Service Muaro Jambi Regency

**Gambar 2.** Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Bahar, 2024 (Sumber: KECAMATAN Sungai Bahar DALAM ANGKA 2025)

Berdasarkan gambar 1 dan 2, Desa Bukit Makmur adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang pada tahun 2024 mencatat jumlah penduduk sebanyak 2.324 jiwa menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Posisi desa ini dapat ditemukan pada peta wilayah Kecamatan Sungai Bahar, di mana rangkaian desa administratif membentang dan terintegrasi dalam satu kawasan yang memiliki potensi pengembangan usaha melalui BUMDes dan KDMP. Jumlah penduduk Desa Bukit Makmur yang tergolong sedang dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Sungai Bahar, serta lokasinya yang strategis, menjadi dasar yang krusial untuk menyusun model bisnis dan SOP unit usaha yang sejalan dengan potensi ekonomi lokal.

Peningkatan kompetensi aparatur desa dalam perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sangat penting agar tata kelola keuangan desa berlangsung secara transparan dan akuntabel. Selain itu, manajemen keuangan dan administrasi BUMDes serta KDMP perlu didukung oleh sistem dan prosedur operasional yang dapat menjamin efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan usaha desa. Kolaborasi antara perangkat desa dan pengelola unit usaha sangat diperlukan untuk memperkuat inovasi, mitigasi risiko, serta adaptasi terhadap perubahan regulasi dan dinamika pasar. Dengan pelatihan khusus, diharapkan Desa Bukit Makmur dapat menjadi model pengelolaan keuangan desa yang baik dan inovatif untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini di berbagai daerah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain regulasi dan kapasitas implementasi di tingkat desa. Sejumlah studi dan praktik pengabdian masyarakat mencatat bahwa kelemahan dalam tata kelola keuangan, perencanaan, dan pertanggungjawaban masih menjadi isu utama di banyak desa, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa dan unit usaha desa (Safira, 2022; Aziza, 2023). Kondisi ini tercermin dalam praktik pembukuan yang masih dilakukan secara manual dan tidak sistematis, laporan keuangan yang belum memenuhi standar, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Akibatnya, potensi Dana Desa untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kepercayaan publik belum sepenuhnya terwujud.

Desa Bukit Makmur di Kecamatan Sungai Bahar merupakan salah satu contoh desa yang memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar melalui keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan kapasitas pengelolaan keuangan dan kelembagaan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa, BUMDes, dan KDMP masih didominasi oleh pencatatan manual, ketiadaan laporan keuangan periodik yang dapat diandalkan, dan belum terbangunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk unit-unit usaha. Berbagai kajian pengabdian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi manajerial dan akuntansi pengelola BUMDes menjadi penyebab utama ketidakteraturan pembukuan dan lemahnya pengawasan internal (Pratama, 2021; Rahmawati, 2022). Situasi ini berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas, menurunnya kepercayaan masyarakat, dan belum optimalnya kontribusi BUMDes dan KDMP terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) serta kemandirian ekonomi desa. Di sisi lain, Desa Bukit Makmur memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan peran BUMDes dan KDMP sebagai penggerak utama ekonomi lokal apabila kapasitas pengelolaan keuangannya diperkuat secara sistematis. Berbagai studi menunjukkan bahwa intervensi berupa pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan, penyusunan model bisnis, serta penataan SOP mampu meningkatkan kualitas pelaporan, disiplin pembukuan, dan kemampuan unit usaha desa dalam merencanakan serta mengevaluasi kinerja keuangan (Setyowati, 2020; Hidayat, 2021). Sejalan dengan perkembangan kebijakan Dana Desa yang kini juga menekankan pemberdayaan ekonomi dan digitalisasi tata kelola, termasuk dorongan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dan BUMDes, penguatan kapasitas pengelola menjadi semakin relevan (Kemendes, 2024; Kemenkeu, 2024; Sifti et al., 2024; Handayani et al., 2025)

Berdasarkan situasi tersebut, kebutuhan utama mitra di Desa Bukit Makmur, yang terdiri dari pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan KDMP, adalah program pengabdian berupa pelatihan dan pendampingan terstruktur dalam tiga ranah utama, yaitu: pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban), penyusunan model bisnis dan SOP unit usaha, serta penguatan manajemen administrasi dan keuangan yang profesional. Program ini dirancang dalam bentuk pelatihan intensif berbasis modul mengenai siklus akuntansi desa dan BUMDes, disertai pendampingan aplikasi laporan keuangan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi BUMDes yang telah diadopsi desa. Melalui pendekatan ini, diharapkan pengelola mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu, sekaligus membangun budaya tata kelola keuangan yang berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi desa. Pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil pelatihan serta pendampingan pengelolaan keuangan desa, BUMDes, dan KDMP di Desa Bukit Makmur sebagai upaya penguatan kelembagaan ekonomi desa. Fokus utama mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, penerapan model bisnis dan SOP yang adaptif terhadap potensi lokal, serta implementasi sistem pelaporan keuangan digital yang mendukung prinsip-prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Diharapkan, pengalaman pengabdian ini dapat menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di

desa lain dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa dan memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan di Indonesia (Nugroho, 2023).

## **METODE**

Metode yang diterapkan dalam program pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa, BUMDes, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bukit Makmur adalah metode deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pelaksanaan kegiatan, respons peserta, serta hasil implementasi dalam konteks yang nyata. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada:

1. Pengamatan langsung (observasi) terhadap pelaksanaan pelatihan, praktik pencatatan keuangan, serta penggunaan aplikasi BUMDes.
2. Wawancara informal dan diskusi terbuka dengan aparatur desa, pengelola BUMDes, KDMP, dan peserta pelatihan untuk menggali pengalaman, kendala, serta persepsi mereka.
3. Dokumentasi berupa modul, SOP, laporan keuangan contoh, serta catatan perkembangan selama pendampingan.
4. Studi kasus dari kondisi dan kebutuhan riil pengelolaan keuangan desa sebagai dasar penyusunan materi, SOP, dan model bisnis.

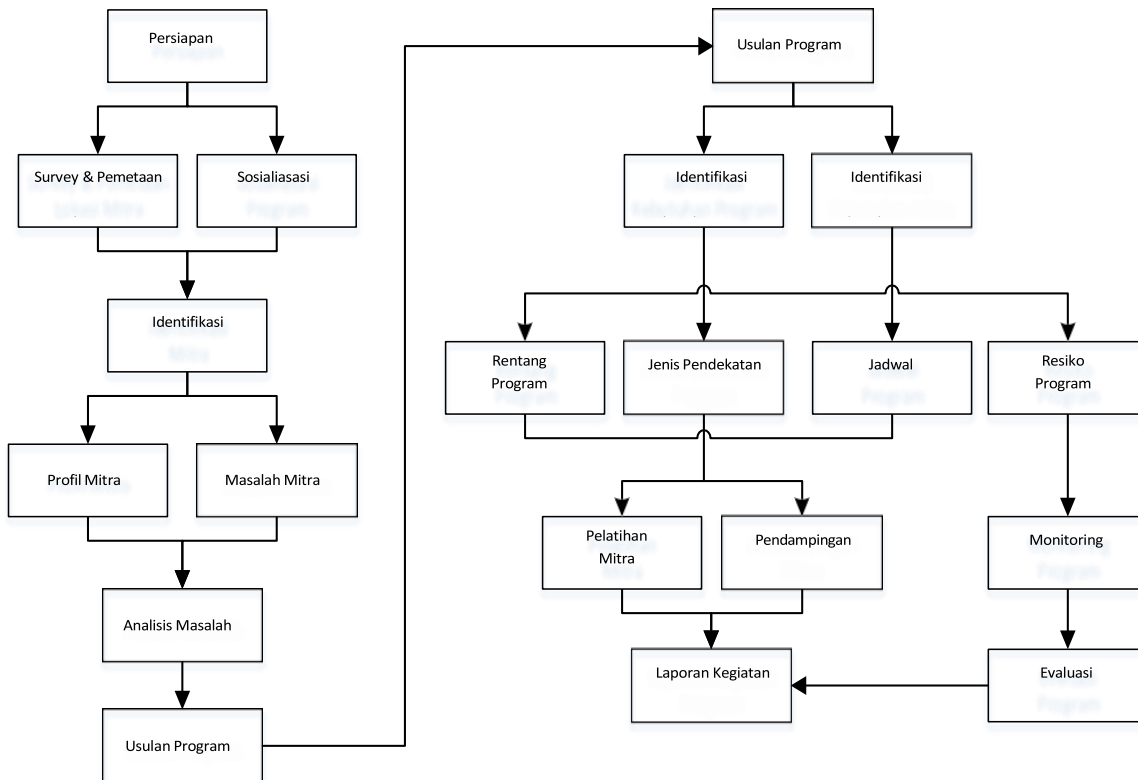
Dengan metode ini, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan realitas implementasi secara komprehensif, sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan bagi keberlanjutan program.

Metode penerapan program pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, praktis, dan berorientasi pada pengalaman langsung. Program ini dilaksanakan dalam empat tahapan utama: Persiapan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi.

1. Persiapan Tahap ini mencakup:
  - Koordinasi dengan pemerintah desa, pengelola BUMDes, KDMP, dan pemangku kepentingan terkait.
  - Identifikasi kebutuhan spesifik pelatihan, seperti kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan atau penggunaan aplikasi digital.
  - Penyusunan modul pelatihan yang berbasis pada kebutuhan peserta.
  - Penyiapan fasilitas pelatihan serta perangkat aplikasi BUMDes.
  - Penyusunan jadwal kegiatan dan pembagian tugas tim pendamping.
2. Pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan dengan berbagai metode yang saling melengkapi, antara lain:
  - Workshop berbasis modul untuk pemahaman teori dan latihan terstruktur.
  - Studi kasus dan simulasi praktik menggunakan data nyata dari desa/BUMDes.
  - Pendampingan teknis penggunaan aplikasi BUMDes, mulai dari input transaksi, pengelolaan buku kas digital, hingga penyusunan laporan otomatis (Anisa et al., 2024).
  - Pendekatan andragogi melalui diskusi kelompok, tanya jawab, curah pendapat, refleksi, dan peran untuk mendorong partisipasi aktif.
  - Bimbingan dalam penyusunan model bisnis dan SOP sesuai karakteristik serta kebutuhan desa. Melalui metode ini, peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga langsung mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang riil dan relevan.
3. Pemantauan (Monitoring)  
Tahap pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai standar dan materi pelatihan diterapkan dengan baik. Kegiatannya meliputi:
  - Pendampingan berkelanjutan kepada pengelola BUMDes dan KDMP.
  - Pemantauan progres pencatatan keuangan dan pelaporan melalui aplikasi.
  - Penguatan kedisiplinan terhadap SOP dan model bisnis yang telah disusun.
  - Pengumpulan umpan balik peserta untuk perbaikan dan penyesuaian metode
4. Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan, seperti:
  - Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
  - Tingkat kepatuhan terhadap SOP.
  - Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.
  - Keberhasilan implementasi model bisnis desa.

Hasil evaluasi dirumuskan dalam laporan evaluasi program yang menjadi dasar rekomendasi tindak lanjut serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.

Kerangka Pemikiran Metode Pelaksanaan



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran Metode Pelaksanaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persiapan dan Sosialisasi

Sebelum pelatihan dimulai, tahap persiapan dan sosialisasi merupakan langkah awal yang sangat krusial. Dalam konteks ini, sosialisasi tidak sekadar penyampaian informasi, melainkan juga upaya untuk membangun kesadaran kolektif di antara aparatur desa, pengelola BUMDes, serta anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bukit Makmur. Pada fase ini, sangat penting untuk menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dan manfaat pelatihan yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, diharapkan peserta dapat melihat relevansi langsung dari pelatihan ini terhadap pengembangan ekonomi desa. Sosialisasi ini juga mencakup penjelasan tentang manfaat digitalisasi sistem akuntansi yang akan diterapkan. Dalam era yang semakin maju, digitalisasi bukan hanya sekadar pilihan, melainkan telah menjadi kebutuhan mendasar. Melalui penggunaan sistem akuntansi berbasis digital, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Sebagai contoh, penggunaan perangkat lunak akuntansi memungkinkan pengelolaan data keuangan yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan penyusunan laporan dan analisis keuangan. Selain itu, penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan unit usaha desa dijelaskan secara mendetail. SOP yang jelas dan terukur akan membantu menciptakan konsistensi dalam setiap proses pengelolaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.



Gambar 3. Survei Lokasi

### Pendampingan

Setelah tahap sosialisasi, pelatihan dilanjutkan dengan pendampingan intensif yang berlangsung selama beberapa hari. Pendampingan ini melibatkan para ahli dari lembaga terkait yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam dalam pengelolaan keuangan. Tujuan dari pendampingan ini adalah memberikan bimbingan langsung kepada peserta, sehingga mereka dapat memahami secara teknis penyusunan laporan keuangan dan aplikasi sistem keuangan berbasis digital yang telah dipilih. Dalam konteks ini, pendampingan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan juga merupakan proses pembelajaran yang interaktif. Selama sesi pendampingan, peserta diajarkan untuk memasukkan data transaksi ke dalam aplikasi keuangan secara sistematis. Proses ini sangat penting, karena dengan memasukkan data yang akurat dan tepat waktu, laporan keuangan yang dihasilkan pun akan lebih terpercaya. Misalnya, peserta belajar untuk mencatat setiap transaksi secara rinci, mulai dari pendapatan hingga pengeluaran, sehingga dapat menghasilkan laporan otomatis yang tidak hanya akurat tetapi juga tepat waktu (Anisa et al., 2024). Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan untuk melakukan interpretasi laporan keuangan. Kemampuan ini sangat krusial untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, karena laporan keuangan yang jelas akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan desa.

#### Perencanaan

Kades, Sekdes, BPD, Camat/Bupati, Dokumen Input, Proses, Perdes, APBDes

#### Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Desa.

LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA ABC  
Kecamatan KLM  
Kabupaten XYZ  
TAHUN ANGGARAN 20xx1

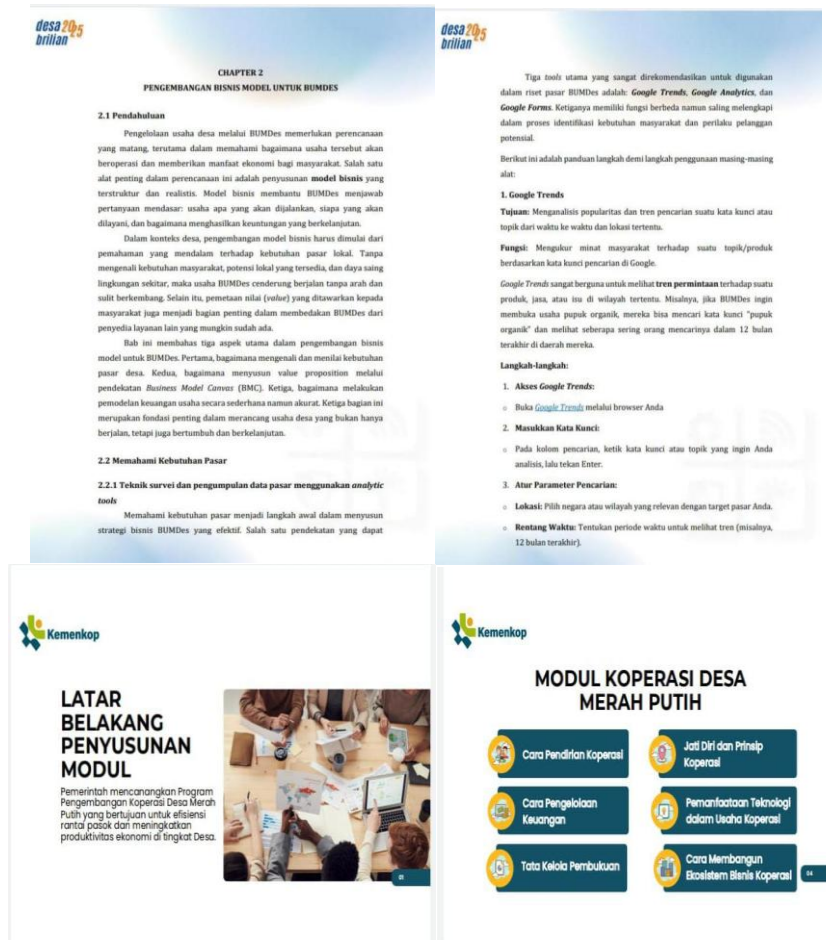
	Ref	Anggaran	Realisasi (Lebih / Kurang)	
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C.2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Alokasi Dana Desa	C.5	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pendapatan Lain lain	C.8	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pembinaan Kemasayratan Desa	C.11 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	C.14	<u>xx.xxx</u>	<u>xx.xxx</u>	<u>xx</u>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx</u>
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan SILPA TAHUN BERJALAN				



Gambar 4. Penginputan Data Transaksi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Bumdes dan KDMP

### Pelatihan Praktik

Pelatihan praktik merupakan komponen yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam sesi ini, metode yang diterapkan meliputi modul dan praktik langsung, sehingga peserta tidak hanya terfokus pada teori, tetapi juga dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh. Peserta diajak untuk terlibat dalam simulasi penyusunan laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan pencatatan kas harian. Melalui pendekatan ini, peserta dapat merasakan secara langsung bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sebagai contoh, dalam simulasi penyusunan laporan laba rugi, peserta belajar untuk mengidentifikasi dan menghitung pendapatan serta biaya yang dikeluarkan. Selain itu, mereka juga diajarkan cara mencatat kas harian dengan tepat, sehingga setiap transaksi dapat dipantau dengan baik. Praktik ini membekali peserta dengan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengelola administrasi dan keuangan unit usaha desa secara lebih terstruktur dan profesional. Dengan keterampilan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan desa akan menjadi lebih efisien dan transparan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.



Gambar 5. Hasil Penyusunan Model Bisnis, SOP Unit Usaha BUMDes dan KDMP

## Pencetakan Laporan Keuangan

Kategori	Saldo
PENGHASILAN USAHA	Rp. 6.000.000
HARGA POKOK PENJUALAN	Rp. 6.000.000
LABA BERSIH OPERASIONAL	Rp. 3.775.000

**BUKUM Desa Pembelian Tandani Buah Segar Bukit Makmur**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)**  
 Untuk posisi terakhir 31 Agustus 2025

Nomor Urut	Uraian	31 Agustus 2025	2024
1	<b>ASET</b>		
2	Aset Lancar		
3	Kas	Rp 58.870.801	Rp 50.216.650
4	<b>Total Aset Lancar</b>	<b>Rp 58.870.801</b>	<b>Rp 50.216.650</b>
5	Investasi		
6	<b>Total Investasi</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
7	Aset Tetap		
8	<b>Total Aset Tetap</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
9	Aset Tak Berwujud		
10	<b>Total Aset Tak Berwujud</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
11	Aset Lain-Lain		
12	<b>Total Aset Lain-Lain</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
13	<b>Total ASET</b>	<b>Rp 58.870.801</b>	<b>Rp 50.216.650</b>
14			
15	<b>KEWAJIBAN</b>		
16	Kewajiban Jangka Pendek		
17	<b>Total Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
18	Kewajiban Jangka Panjang		
19	<b>Total Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
20	<b>Total KEWAJIBAN</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
21			
22	<b>EKUITAS</b>		

**BUKUM Desa Pembelian Tandani Buah Segar Bukit Makmur**  
**BUKU BESAR**  
 KODE AKUN : 1.1.01.01  
 NAMA AKUN : Kas Tunai

Tanggal	Nomor Bakti	Transaksi	Debit	Kredit	Saldo
12-12-2024	0003/12/PTB/2024	Tarik tunai dari bank	Rp 50.000.000	Rp -	Rp 50.000.000
20-12-2024	0004/12/PTB/2024	Beban operasional angkut TBS	Rp -	Rp 200.000	Rp 49.800.000
30-12-2024	0002/12/PTB/2024	Penjualan TBS	Rp 416.650	Rp -	Rp 50.216.650
15-01-2025	0001/01/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 454.545	Rp -	Rp 50.671.195
25-01-2025	0002/01/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 459.558	Rp -	Rp 51.130.753
10-02-2025	0001/02/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 349.610	Rp -	Rp 51.480.363
22-02-2025	0002/02/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 407.830	Rp -	Rp 51.888.193
08-03-2025	0001/03/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 420.168	Rp -	Rp 52.308.361
23-03-2025	0002/03/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 425.170	Rp -	Rp 52.733.531
04-04-2025	0001/04/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 446.428	Rp -	Rp 53.179.959
25-04-2025	0002/04/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 440.140	Rp -	Rp 53.620.099
10-05-2025	0001/05/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 470.809	Rp -	Rp 54.090.908
25-05-2025	0002/05/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 451.263	Rp -	Rp 54.542.171
10-06-2025	0001/06/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 450.450	Rp -	Rp 54.992.621
05-07-2025	0001/07/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 446.428	Rp -	Rp 55.439.049
20-07-2025	0002/07/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 443.262	Rp -	Rp 55.882.311
01-08-2025	0001/08/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 688.468	Rp -	Rp 56.570.779
17-08-2025	0002/08/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 713.012	Rp -	Rp 57.283.791
31-08-2025	0003/08/PTB/2025	Penjualan TBS	Rp 1.587.010	Rp -	Rp 58.870.801

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**NO : 400/001/BKM-III/XII/2024**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARYONO  
 Jabatan : Ketua Bumdes  
 Alamat : Jl.Poros, Rt/Rw : 05/-, Desa Bukit Makmur  
 Kec. Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi

Dalam hal ini bertindak sebagai **Pihak Pertama**

Nama : M SARDINI  
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani  
 Alamat : Jl.Sungai Kandang, Desa Bukit Makmur  
 Kec. Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi

Dalam hal ini bertindak sebagai **Pihak ke Dua**

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dalam Mengelola Modal Usaha Dana BUMDES dengan rincian sebagai berikut :

- Modal Usaha Rp 50.000.000.
- Pembelian Tandani Buah Segar (TBS)
- Harga Ditentukan oleh KUD/Kelompok Tani
- Keuntungan 25 Rupiah/Kg
- Pembayaran dilakukan secara tunai/cash setiap satu bulan sekali
- Kerjasama Pembelian Tandani Buah Segar ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 1 (Satu Tahun) terhitung sejak tanggal (03 Januari 2025) dan berakhir pada tanggal (03 Januari 2026)
- Setelah Jangka waktu tersebut berakhir dan **Pihak Pertama** bermaksud untuk memperpanjang, maka **Pihak Pertama** harus memberitahukan kepada **Pihak Kedua** secara tertulis, selambat-lambatnya (Desember 2025) sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- Apabila dalam pelaksanaannya **Pihak Pertama** dan/atau **Pihak Kedua** yang dimaksud dalam perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *Force Majeure/tidak terduga*, maka segala kerugian yang timbul akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah Bersama.
- Dalam hal peristiwa *Force Majeure/tidak terduga* tersebut diatas mengakibatkan kegiatan Usaha **Pihak Pertama** dan/atau **Pihak Kedua** yang dimaksud dalam Perjanjian ini ditutup dan tidak dapat

	<b>BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)</b> <b>"USAHA BERSAMA"</b> Jl. Murbey Raya, Rt. 007 Dusun Sumber Agung	
	STANDAR OPERASIONAL	No. Dokumen : SOP/UB/001
	PEMBELIAN TANDANI BUAH SEGAR (TBS)	Revisi : 00
	KELAPA SAWIT	Halaman : 1/4
		Tanggal Berlaku : 03 Januari 2025

**1. TUJUAN**

Tujuan dari adanya Pembelian Tandani Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dalam SOP Pembelian Tandani Buah Segar (TBS) BUMDes adalah untuk memfasilitasi para Petani Kelapa Sawit melalui pembelian TBS Kelapa Sawit tersebut dengan diwadahi oleh unit usaha yang terorganisir. Dengan Pembelian Tandani Buah Segar (TBS) yang sistematis, BUMDes dapat membantu para Petani untuk lebih mempercepat proses tahapan transaksi jual beli, mengingat bahwa di Desa Bukit Makmur memiliki Koperasi Unit Desa yang membina terkait perkembangan Kelapa Sawit namun dalam hal pencatatan dana dalam proses jual beli masih harus menunggu mulai dari 5 hingga 7 hari baru bisa di bayarkan.

**2. CAKUPAN**

Cakupan Pembelian Tandani Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dalam SOP Pembelian Tandani Buah Segar (TBS) BUMDes yaitu apabila Petani Kelapa Sawit telah melakukan Penanaman Tandani Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang nantinya akan di timbang oleh unit usaha tersebut dan nantinya akan dibayarkan sesuai dengan harga Het yang berlaku pada hari tersebut.

**3. DEFINISI**

Pembelian Tandani Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit pada SOP Pembelian Tandani Buah Segar (TBS) BUMDes adalah serangkaian kegiatan transaksi jual beli hasil panen kelapa sawit dalam bentuk tandani buah segar (TBS) antara pihak petani atau pemilik kebun dengan unit usaha BUMDes dengan standar harga yang berlaku hari tersebut.

**4. DOKUMEN**

- Adapun dokumentasi sebagai berikut :
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
  - Data Potensi Hasil Panen Kelapa Sawit Desa
  - Dokumen Perjanjian Kerjasama (MoU)
  - Laporan Keuangan dan Pembelian Tandani Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit
  - Manual Operasional atau Panduan Kerja
  - Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

**5. RINCIAN PROSEDUR**

No.	KEGIATAN	TANGGUNG JAWAB
5.1	Melakukan survei dan pemetaan potensi Hasil Panen Kelapa Sawit Desa, seperti jumlah petani yang akan diakomodir pembelannya serta tonase hasil panen Kelapa Sawit.	
5.2	Membuat rencana kegiatan tahunan yang mencakup program pendampingan para petani, membuat rencana kerja penimbangan TBS.	
5.3	Memastikan ketersediaan alat penimbangan serta tempat penimbangan TBS.	TIM PEMBELIAN TANDANI BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
5.4	Menatur proses penecolehan hasil panen Tandani Buah Segar (TBS)	

**Gambar 6.** Hasil Laporan Keuangan Bumdes, Surat Perjanjian Kerjasama dan (SOP) Bumdes

### **Monitoring dan Evaluasi**

Pelaksanaan pelatihan tidak hanya berakhir pada tahap pengajaran, melainkan juga diiringi oleh pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan ilmu yang diperoleh berlangsung efektif di lapangan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana peningkatan kapasitas teknis pengelola keuangan dan administrasi desa. Dalam proses ini, evaluasi juga berfungsi untuk mengukur apakah penerapan aplikasi keuangan memberikan kemudahan dan akurasi yang diharapkan. Sebagai contoh, setelah beberapa waktu pasca pelatihan, dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana peserta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Apakah aparat desa mampu menyusun laporan keuangan dengan baik? Apakah aparat desa merasa lebih percaya diri dalam mengelola keuangan desa? Pemantauan ini juga menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi pendampingan lanjutan demi kesinambungan peningkatan kapasitas pengelola. Dengan demikian, proses evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.



**Gambar 7.** Hasil Monitoring dan Evaluasi bersama Perangkat Desa

### **Hasil dan Keberlanjutan Program**

Program Pelatihan ini berhasil secara signifikan meningkatkan kapasitas pengelola keuangan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bukit Makmur. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah kemajuan dalam penyusunan laporan keuangan serta pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis digital. Dengan adanya peningkatan ini, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan desa mengalami kemajuan yang sangat berarti. Hal ini berdampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, keberlanjutan hasil pelatihan ini sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah desa serta keberlangsungan pendampingan secara berkala. Tanpa adanya dukungan yang berkelanjutan, kemampuan pengelola keuangan desa berpotensi mengalami stagnasi. Oleh karena itu, adalah penting bagi pemerintah desa untuk senantiasa memberikan perhatian dan dukungan terhadap pengelolaan BUMDes dan Kelompok Dasar Masyarakat Peduli (KDMP). Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan kemampuan pengelola keuangan desa dapat terus ditingkatkan, sehingga BUMDes dan KDMP dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa yang profesional dan berkelanjutan. Pelatihan yang dilaksanakan di Desa Bukit Makmur tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan keuangan yang baik. Dengan persiapan yang matang, pendampingan yang intensif, pelatihan praktik yang efektif, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih optimal. Keberhasilan pelatihan ini menjadi langkah awal yang krusial untuk menciptakan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan dalam pengelolaan ekonomi.

### **Rekomendasi Perencanaan, Penatausahaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Desa Bukit Makmur telah menunjukkan kemajuan dalam tata kelola digital melalui website desa, dashboard transparansi anggaran, dan layanan publik online. Untuk memperkuat capaian tersebut, diperlukan pengembangan sistem keuangan desa terintegrasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban secara digital dan terstandar. Proses perencanaan telah selaras dengan RPJM Desa, menandakan bahwa arah pembangunan dan penggunaan anggaran sesuai visi-misi desa. Penatausahaan keuangan juga berjalan tertib, namun

sistem pengkodean dokumen perlu diperbaiki agar terintegrasi dengan Siskeudes untuk memudahkan pencarian data, pelaporan, dan audit. Penguatan kapasitas aparatur keuangan sangat diperlukan melalui pelatihan COA, jurnal akuntansi, dan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan. Dalam penyusunan LPJ ditemukan bahwa pengkodean berkas belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga proses masih manual. Oleh karena itu, desa perlu menerapkan standar pengkodean yang seragam dengan Siskeudes. Semua dokumen pendukung LPJ telah lengkap dan terdigitalisasi, meski terdapat satu kesalahan input bukti setor pajak yang harus segera diperbaiki. Digitalisasi dokumen LPJ menjadi langkah maju untuk memudahkan audit. Untuk BUMDes, pencatatan transaksi pada unit usaha masih perlu dirinci agar arus kas, biaya, dan laba tiap unit dapat tergambar jelas. Sebagai penguatan transparansi, desa direkomendasikan menerapkan sistem monitoring keuangan berbasis open data yang terintegrasi dengan situs desa. Dengan tata kelola yang tertib, aparatur kompeten, dan dukungan sistem digital, Desa Bukit Makmur berpotensi menjadi model Good Village Governance berbasis transparansi digital.

### **Rekomendasi Pelaporan Keuangan BUMDes**

BUMDes Usaha Bersama telah mengelola berbagai unit usaha produktif dengan baik, namun perlu penguatan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Salah satu langkah penting adalah menerapkan digitalisasi pembukuan melalui aplikasi keuangan daring terintegrasi, sehingga pencatatan unit-unit usaha dapat dikonsolidasi dengan mudah (Nuraini & Putra, 2025). BUMDes juga perlu menyusun SOP Akuntansi Internal mencakup penjurnalan, pengakuan pendapatan, biaya, dan pengelolaan aset untuk mengurangi kesalahan pencatatan. Pelaporan keuangan triwulanan—berupa neraca, laba-rugi, dan arus kas harus dilakukan secara rutin sebagai dasar evaluasi bersama pemerintah desa. Pencatatan keuangan unit usaha ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan perlu diperinci agar analisis laba dan arus kas lebih akurat. Kapasitas bendahara dan manajer keuangan harus ditingkatkan melalui pelatihan HPP, pengelolaan persediaan, dan analisis laba per unit. Dengan pelaporan digital, SOP yang jelas, dan SDM yang kompeten, BUMDes berpotensi menjadi contoh pengelolaan keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel, mendukung terwujudnya Good Village Governance.

### **Rekomendasi Pengembangan Bisnis & SOP BUMDes**

Desa Bukit Makmur memiliki potensi ekonomi kuat di sektor sawit, pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, BUMDes disarankan mengembangkan model bisnis agroindustri dan ekonomi sirkular, termasuk hilirisasi TBS menjadi pupuk organik cair, bioenergi, dan produk herbal berbasis CPO. Program unggulan seperti "Pangan Sehat Bukit Makmur" telah mengintegrasikan budidaya sayur dan ikan dengan teknologi pertanian cerdas serta kolaborasi dengan sektor kesehatan, yang berdampak pada peningkatan gizi dan pendapatan masyarakat. Event Trail Adventure Bukit Makmur juga menjadi daya tarik wisata yang berdampak ekonomi bagi UMKM lokal sambil mengedukasi masyarakat melalui kampanye Zero Waste Event. Unit usaha ketahanan pangan desa menunjukkan ketangguhan melalui komoditas unggulan lokal, peternakan kambing, dan budidaya ikan ramah lingkungan. Pemberdayaan perempuan melalui UP2K juga menghasilkan produk kreatif seperti Keripik Gedebog Pisang yang telah menembus pasar dan siap masuk marketplace. Desa juga menjaga pelestarian budaya lokal melalui Tari Rangguk sebagai identitas budaya masyarakat. Program literasi digital dan kewirausahaan membantu pemuda dan UMKM mengembangkan pemasaran digital, inovasi produk, dan branding. BUMDes perlu menerapkan SOP komprehensif untuk produksi, tata niaga, keuangan, dan pelaporan, serta melakukan evaluasi rutin. Dengan sinergi inovasi ekonomi, pemberdayaan sosial, dan pelestarian budaya, Desa Bukit Makmur menjadi model Smart Agro-Ecopreneurship yang mengintegrasikan digitalisasi, ekonomi hijau, dan nilai budaya lokal.

Berikut rekomendasi pengembangan produk snack dan makanan ringan untuk pemberdayaan masyarakat dan UMKM/PKK Desa Bukit Makmur:

Komoditas	Ide Produk Snack / Makanan Ringan	Nilai Tambah & Inovasi	Potensi Pelaksana (Kelompok)
Pare pahit	Keripik pare, teh herbal pare pahit, pare crispy pedas	Produk kesehatan dan camilan fungsional, bisa diklaim "anti-diabetes alami"	Ibu PKK, KWT (Kelompok Wanita Tani)
Jagung manis	Keripik jagung manis, popcorn manis pedas, dodol jagung, susu jagung segar	Produk bernutrisi dan mudah dikembangkan dengan teknologi sederhana	UMKM pemula dan remaja kreatif
Kacang tanah	Kacang sangrai rempah, bumbu pecel khas Bukit Makmur, selai kacang lokal	Potensi tinggi untuk pasar oleh-oleh dan souvenir desa	UMKM, koperasi desa
Bayam & Kangkung	Keripik bayam, stik kangkung, abon sayur kering	Mudah diproduksi, tinggi permintaan di pasar modern	Ibu PKK, pelajar sekolah
Cabe & Sawi	Sambal botolane cabe lokal, acar sawi asam pedas, saus cabai fermentasi alami	Produk khas desa dengan branding "sambal Bukit Makmur"	KWT, kelompok pengolahan pangan
Ikan lele	Abon lele, kerupuk kulit lele, lele crispy instan, bakso lele beku	Produk unggulan protein tinggi dan inovatif	Kelompok nelayan & UMKM kuliner
Sawit (limbah TBS)	Sabun herbal minyak sawit, briket bioenergi	Diversifikasi BUMDes, mendukung green economy	BUMDes Bukit Makmur Sejahtera

**Gambar 8.** Hasil Rekomendasi Pengembangan dari Ketahanan Pangan menjadi Olah Pangan Produk

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan :

Pelatihan dan pendampingan yang terarah pada pengelolaan keuangan desa serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kapasitas teknis aparatur desa dan pengelola. Proses ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis yang esensial dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, peserta pelatihan telah berhasil memahami siklus akuntansi secara mendalam, mulai dari pencatatan transaksi harian hingga penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan. Dengan memanfaatkan aplikasi BUMDes yang telah diperkenalkan, mereka kini mampu melakukan pencatatan yang lebih terstruktur dan minim kesalahan, yang sebelumnya sering menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut, pengelolaan administrasi dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk unit usaha juga mengalami transformasi yang signifikan. Berkat pelatihan ini, proses penyusunan SOP menjadi lebih terstruktur dan profesional, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan usaha desa. Contoh konkret dari hal ini adalah pengembangan SOP yang jelas untuk setiap jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes, sehingga setiap anggota tim memiliki panduan yang konsisten dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Peningkatan kapasitas yang dicapai melalui pelatihan ini sangat mendukung terciptanya tata kelola keuangan desa yang sejalan dengan prinsip good governance. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa pun meningkat. Sebagai contoh, masyarakat yang sebelumnya ragu untuk berinvestasi dalam program-program desa kini lebih percaya dan bersedia berpartisipasi aktif, karena mereka menyaksikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini merupakan langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif berkontribusi terhadap kemajuan desanya.

### Saran :

1. Penguatan Pendampingan Berkelanjutan

Untuk memastikan keberlanjutan dari hasil pelatihan ini, diperlukan adanya pendampingan lanjutan secara periodik. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan praktik pengelolaan keuangan, penggunaan aplikasi, dan SOP tetap konsisten dan efektif di masa mendatang. Dengan adanya pendampingan yang rutin, para pengelola akan lebih mudah mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi sehari-hari.

2. Pengembangan Kapasitas SDM Lebih Luas

Selain itu, perluasan pelatihan kepada lebih banyak aparat desa dan pengelola unit usaha menjadi hal yang krusial. Hal ini termasuk melibatkan generasi muda dan perempuan dalam proses pelatihan, agar kapasitas kelembagaan desa semakin merata dan berkelanjutan. Dengan melibatkan generasi muda, desa dapat memastikan adanya regenerasi yang baik dalam pengelolaan keuangan dan usaha.

3. Optimalisasi Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi digital dalam pengelolaan keuangan desa juga perlu ditingkatkan. Dalam era digital saat ini, kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dengan baik sangat penting. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kompetensi digital harus menjadi bagian integral dari program pelatihan.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Mengembangkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.

5. Penguatan Pengelolaan Model Bisnis dan SOP

Terakhir, perlu adanya penyempurnaan dan sosialisasi model bisnis serta SOP yang adaptif terhadap dinamika usaha desa. Unit usaha BUMDes dan KDMP dapat menjadi lebih efisien dan berdaya saing.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Desa Bukit Makmur dapat mengoptimalkan peran BUMDes dan KDMP sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan penggunaan teknologi yang tepat, desa ini akan mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat saat ini, tetapi juga akan menjadi warisan positif bagi generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R., Ardini, L., & Kurniawan, A. (2024). Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 12(1), 45–58.
- Anisa, N., Handayani, A., & Berkah, A. (2024). Digitalisasi pengelolaan keuangan desa: Analisis implementasi aplikasi keuangan pada BUMDes Bebedahan Berkah. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen*, 9(2), 88–99.
- Aziza, R. (2023). Tantangan tata kelola keuangan desa dan unit usaha desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 34–49.
- Desa Bukit Makmur. (2025). Berita dan informasi pembangunan desa dan program pendampingan. <https://bukitmakmur.desa.id/>
- Djahmiq, N., Suryadi, H., & Safitri, S. (2022). Transparansi pengelolaan Dana Desa: Permasalahan dan solusi. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 8(2), 112–127.
- Efrina, L., & Purnama, F. (2025). Pendampingan digitalisasi dan manajemen keuangan BUMDes dan KDMP Desa Bukit Makmur. <https://paalmerah.com/2025/11/20/desa-bukit-makmur-jadi-salah-satu-dari-15-desa-terbaik-program-desa-brilian-2025-jalani-pendampingan-eksklusif/>
- Handayani, A., Anisa, N., & Berkah, A. (2025). Digitalisasi laporan keuangan sebagai upaya transparansi pengelolaan keuangan BUMDes. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 55–64.
- Kemendesa PDTT. (2024). Pedoman digitalisasi tata kelola keuangan desa dan BUMDes. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kemenkeu RI. (2024). Kebijakan penguatan kapasitas pengelola Dana Desa melalui digitalisasi sistem akuntansi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Lindawaty, L., Pramana, D., & Sari, Y. (2023). Implementasi otonomi desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan*, 15(2), 67–80.
- Maulana, S., Kurniasih, D., & Syahputra, I. (2025). Studi kasus manajemen keuangan di Desa Bukit Makmur: Kendala dan rekomendasi. *Jurnal Pengembangan Desa dan UMKM*, 21(1), 10–22.
- Nugroho, B. (2023). Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pelatihan dan pendampingan digitalisasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 110–125.
- Nuraini, N., & Putra, R. (2025). Penggunaan sistem informasi akuntansi sebagai transisi dari akuntansi manual pada Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 14(1), 25–36.
- Pratama, Y. (2021). Analisis kinerja pengelolaan keuangan BUMDes dan dampaknya terhadap kemandirian desa. *Jurnal Ekonomi Desa*, 10(3), 67–81.
- Pratiwi, D., Wijayanti, R., & Jatmiko, R. (2023). Efektivitas pelatihan manajemen keuangan dalam meningkatkan kinerja BUMDes. *Jurnal Ekonomi Desa*, 7(1), 34–46.
- Putri, M., Hasanah, F., & Tanjung, A. (2022). Keterbatasan kompetensi teknis dan pengawasan dalam pengelolaan BUMDes. *Jurnal Manajemen Desa*, 11(2), 91–104.
- Rahmawati, L. (2022). Peran kompetensi manajerial dalam penguatan pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Manajemen Desa*, 4(1), 22–37.
- Setyowati, D. (2020). Pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Pengembangan Desa*, 9(4), 88–103.
- Sifti, R., Nurhayati, D., & Hidayah, S. (2024). Pengaruh digitalisasi keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *e-Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 101–115.
- Sutrisno, S., Ramadhan, T., & Fajar, A. (2024). Penguatan SOP dan model bisnis BUMDes sebagai strategi peningkatan PADes. *Jurnal Inovasi Desa Berkelanjutan*, 9(3), 38–51.